

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026**  
**Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen,**  
**dan Tertib Niaga**

**A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Triwulan I Tahun 2026**

| No         | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                                    | Satuan     | Target Tahun 2026 | Target Triwulanan 2026 | Realisasi Triwulan I | Capaian (%) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| <b>I</b>   | <b><i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri</i></b>                                                                                                                                      |            |                   |                        |                      |             |
| 1.1        | Indikator 1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera                                                                                                                                      | Persen     | 12,27             | 12,27                  | 14,27                | <b>116</b>  |
| 1.2        | Indikator 1.2 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa                                                                                                                                          | Persen     | 13,59             | 13,59                  | 16,16                | <b>118</b>  |
| 1.3        | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional                                                                                                                                                               | Persen     | 100               | 25                     | 40                   | <b>160</b>  |
| <b>II</b>  | <b><i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas</i></b>                                                                                   |            |                   |                        |                      |             |
| 2.1        | Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel                                                                                                        | Persentase | 85                | <b>20</b>              | <b>20</b>            | <b>100</b>  |
| 2.2        | Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan                                                                                  | Persentase | 85                | 20                     | <b>20</b>            | <b>100</b>  |
| <b>III</b> | <b><i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas</i></b> |            |                   |                        |                      |             |
| 3.1        | Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian                                                                                                                                    | Indeks     | 3 dari 4          | 3 dari 4               | 3 dari 4*            | <b>100</b>  |

|            |                                                                                                                                                     |            |    |    |    |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|------------|
|            | Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga                                                                    |            |    |    |    |            |
| <b>IV</b>  | <b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas</b> |            |    |    |    |            |
| <b>4.1</b> | Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga                     | Persentase | 92 | 20 | 20 | <b>100</b> |

\*Nilai Semester II Tahun 2025

Kinerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan dalam Negeri yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera
2. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa
3. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.1. Kontribusi**

**Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera**

#### **Latar Belakang**

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri.

Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut.

Dalam konteks regional, Pulau Sumatera sebagai salah satu kawasan ekonomi utama di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perdagangan, khususnya perdagangan besar dan eceran. Secara keseluruhan,

Pulau Sumatera merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada sumber daya alam, pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan Sumatera sebagai kontributor penting dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2025, Pulau Sumatera secara spasial menjadi kontributor terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 22,22% terhadap PDB.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Pulau Sumatera dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran di seluruh wilayah Sumatera terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin besar pula peran sektor perdagangan besar dan eceran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, indikator **Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera** digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dalam memperkuat nilai perdagangan dalam negeri. Melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, dan pengawasan yang tepat, diharapkan sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat daya saing perdagangan domestik di tingkat nasional.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 12,27%, Penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada Lampiran 2 RPJMN 2026-2029. Adapun target triwulan sebesar 12,27%, Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 14,27% atau mencapai 116% dari target Tahun 2026 sebesar 12,27% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                            | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
| IKU-1.1<br>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera | Persen | 12,27  | 14,27     | 116<br>(Memuaskan) |

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDB yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 13,07%. Pada saat laporan ini disusun, data telah dirilis oleh BPS, namun data dimaksud masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga konsistensi, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDRB Kategori G, namun data tersebut belum kami dapatkan sampai laporan ini disusun.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diskusi Strategi Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/02/2026;
2. Kunjungan Kerja Terkait Data Perdagangan Besar dan Eceran ke BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/02/2026;
3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/02/2026;
4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/06/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/02/2026;
6. Penyampaian Tanggapan atas Surat Bupati Biak Numfor terkait Usulan Pembangunan Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/02/2026;

Mengingat capaian pada triwulan pertama serta tren pada tahun-tahun sebelumnya maka target kinerja tahun 2026 tentang Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera ini dapat terpenuhi.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>1.1 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera</b> |                                                                                                             |               |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                          | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                                                                    | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                             |
| 1.                                                                                 | Identifikasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera | Terlaksana    | Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

## Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih dalam masa pemulihan pasca bencana yang menyebabkan kerusakan parah pada pasar tradisional dan ritel modern serta jalur logistik.
2. Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke ritel modern serta *e-commerce*.
3. Belum optimalnya sistem perlindungan konsumen terutama penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan Kemendag serta Kementerian terkait untuk memantau proses pemulihan pasca bencana.
2. Koordinasi optimalisasi kemitraan antara ritel modern dan UMKM.
3. Koordinasi penguatan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 1.2. Kontribusi

#### *Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa*

#### Latar Belakang

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri.

Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut.

Dalam konteks regional, Pulau Jawa sebagai salah satu kawasan ekonomi utama di Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor perdagangan, khususnya perdagangan besar dan eceran. Secara keseluruhan, Pulau Jawa merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusi signifikan dari berbagai sektor di pulau ini, terutama yang berbasis pada sumber daya alam, pertanian, industri, dan perdagangan, menjadikan Jawa sebagai kontributor penting dalam pembentukan PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2025, Pulau Jawa secara spasial menjadi kontributor terbesar terhadap struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,93% terhadap PDB.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Pulau Jawa dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran di seluruh wilayah Jawa terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin besar pula peran sektor

perdagangan besar dan eceran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, dan sebaliknya.

Oleh karena itu, indikator **Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa** digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dalam memperkuat nilai perdagangan dalam negeri. Melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, dan pengawasan yang tepat, diharapkan sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat daya saing perdagangan domestik di tingkat nasional.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 13,59% penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada Lampiran 2 RPJMN 2026-2029. Adapun target triwulan sebesar 13,59%, Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya, di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 16,16% atau mencapai 118% dari target Tahun 2026 sebesar 13,59% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                        | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
| IKU-1.1<br>Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa | Persen | 13,31  | 16,16     | 118<br>(Memuaskan) |

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa yang mencapai target merupakan *cascading direct* dari Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDB yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 13,07%. Pada saat laporan ini disusun, data telah dirilis oleh BPS, namun data dimaksud masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga konsistensi, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDRB Kategori G, namun data tersebut belum kami dapatkan sampai laporan ini disusun.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diskusi Strategi Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/02/2026;
2. Kunjungan Kerja Terkait Data Perdagangan Besar dan Eceran ke BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/02/2026;
3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/02/2026;

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan berdasarkan surat Nomor PED.01.01/06/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/11/D.III.M.EKON.2/02/2026;
6. Penyampaian Tanggapan atas Surat Bupati Biak Numfor terkait Usulan Pembangunan Sistem Resi Gudang Tahun Anggaran 2026 dengan Nota Dinas Nomor PED.01.01/09/D.III.M.EKON.2/02/2026;

Mengingat capaian pada triwulan pertama serta tren pada tahun-tahun sebelumnya maka target kinerja tahun 2026 tentang Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa ini dapat terpenuhi.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>1.2 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa</b> |                                                                                                         |               |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                      | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                                                                | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                             |
| 1.                                                                             | Identifikasi kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa | Terlaksana    | Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha dan kunjungan ke dinas daerah |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke ritel modern serta *e-commerce*.
2. Belum optimalnya sistem perlindungan konsumen terutama penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi optimalisasi kemitraan antara ritel modern dan UMKM.

2. Koordinasi penguatan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **1.3. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional**

#### **Latar Belakang**

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran strategis ini dapat memberikan gambaran kinerja sektor perdagangan dalam negeri yang juga pada gilirannya dapat memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dalam mengambil upaya-upaya perbaikan di sektor perdagangan dalam negeri.

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran akan meningkatkan efisiensi pasar domestik dan mendorong pertumbuhan nilai transaksi perdagangan nasional.

Adapun, program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran;
2. Friday Mubarak;
3. BINA Indonesia Great Sale;
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS);
5. EPIC Sale.

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, E-Commerce Association) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional dihitung dengan membandingkan kegiatan program belanja nasional yang telah terlaksana terhadap seluruh program belanja nasional yang direncanakan, kemudian dikalikan 100 persen. Tujuannya adalah untuk mengetahui Mengukur tingkat konsistensi penyelenggaraan kegiatan Program Belanja Nasional. Semakin tinggi persentase hasil perhitungan, semakin konsisten pula pelaksanaan program belanja nasional yang dapat mendukung pertumbuhan pektor perdagangan besar dan eceran.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 ini didasarkan pada rencana pelaksanaan program belanja nasional pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25%, penetapan target ini dilihat dari jadwal pelaksanaan program belanja nasional.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional yang telah terealisasi sebesar 40% dengan terlaksananya 2 program belanja yaitu BINA Lebaran dan Friday Mubarak. Dengan demikian, capaian target adalah sebesar 40% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:



| Indikator Kinerja Utama                                                 | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| IKU-1.3<br>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional | Persen | 25     | 40        | 140%<br>(Memuaskan) |

Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional merupakan *cascading direct* dari Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 100%.

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pencapaian target Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Program Belanja Nasional Tahun 2025 dan Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/01/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Laporan Diskusi Harbolnas 2025 berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/27/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 dan HBKN Tahun 2026 berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/02/D.III.M.EKON.2/01/2026;
4. Menghadiri undangan Konferensi Pers BINA Lebaran Tahun 2026 dari HIPINDO;
5. Menghadiri undangan *Kick-off Ceremony* Friday Mubarak dari APRINDO;
6. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Program Belanja Nasional Triwulan 1 Tahun 2026 dan Pelaksanaan Program Belanja Nasional Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat capaian pada triwulan pertama maka target kinerja tahun 2026 tentang Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional ini dapat terpenuhi.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| 1.3 Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Program Belanja Nasional |                                                            |            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                               | Rencana Aksi TW I                                          | Status     | Keterangan                                                                                      |
| 1.                                                               | Evaluasi pelaksanaan program belanja masyarakat Tahun 2025 | Terlaksana | Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha |

|    |                                                                           |            |                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Koordinasi persiapan pelaksanaan program BINA Ramadhan dan Friday Mubarak | Terlaksana | Telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Menurunnya daya beli masyarakat.
2. Masih belum optimalnya promosi program belanja nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi pelaksanaan program belanja dengan diskon yang diharapkan dapat menarik minat belanja.
2. Koordinasi promosi program belanja nasional di kanal resmi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

## **2**

### **Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian**

#### **Latar Belakang**

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

**Kebijakan terkait  
Perdagangan Ritel**

yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis prespektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                              | Satuan     | Target                                    | Realisasi | % Kinerja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| IKU-2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel | Presentase | Tahunan:<br>85%<br><br>Triwulan I:<br>20% | 20%       | 100%      |

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Tanggapan atas Permohonan Kesediaan Menko Perekonomian sebagai Dewan Pengarah DPP APRINDO berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/04/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Surat Permohonan Data Transaksi VAT *Refund* berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/08/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Penyampaian Tindak Lanjut Koordinasi Optimalisasi Program *Value-Added Tax (VAT) Refund* terhadap Sektor Pariwisata berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/14/D.III.M.EKON.2/02/2026;
4. Penyampaian Pembahasan Strategi Penguatan Daya Saing Pelaku Usaha dan Produk dan/atau Jenama Dalam Negeri pada Platform PMSE berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/12/D.III.M.EKON.2/02/2026;
5. Penyampaian Laporan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri UMKM Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Digital berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.01/16/D.III.M.EKON.2/02/2026;

6. Kunjungan ke DPP APRINDO Jawa Timur dalam rangka Implementasi Kebijakan Usaha Retail berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/03/D.III.M.EKON.2/01/2026;

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel</b> |                                                            |               |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                        | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                   | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                      |
| 1.                                                                                                               | Identifikasi permasalahan terkait Pengembangan Usaha Ritel | Terlaksana    | Telah terlaksana melalui penyampaian sejumlah Nota Dinas kepada Deputi |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Sosialisasi dan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan.

## **2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan**

### **Latar Belakang**

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif

**Pengendalian  
Kebijakan terkait  
Standarisasi dan  
Pengawasan  
Perdagangan**

*stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan target Tahun 2026 dapat dilihat melalui ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                             | Satuan     | Target          | Realisasi | % Kinerja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| IKU-2.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan | Presentase | Tahunan: 85%    | 20%       | 100%      |
|                                                                                                                                     |            | Triwulan I: 20% |           |           |
|                                                                                                                                     |            |                 |           |           |

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Usaha Ritel pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Penyampaian Kajian Kebijakan Integrasi Vertikal dalam Perspektif Persaingan Usaha berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.03/01/D.III.M.EKON.2/01/2026;
2. Penyampaian Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Unit Kerja Penanggungjawab RKepmenko Perekonomian tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.03/01/D.III.M.EKON.2/01/2026, dan PED.01.02/24/D.III.M.EKON.2/01/2026;
3. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke UPT BPSK Kota Medan berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/07/D.III.EKON/02/2026;
4. Penyampaian bahan Dampak Paparan Asbes sebagai Tindak Lanjut Surat Wamenkes berdasarkan Nota Dinas Nomor PED.01.04/28/D.III.EKON.2/03/2026;

5. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen ke UPT BPSK Kota Palembang berdasarkan Surat Nomor PED.01.01/05/D.III.EKON/02/2026;
6. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Unit Kerja Penanggungjawab RKepmenko Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN berdasarkan Surat Nomor PED.01.02/06/D.III.EKON.2/02/2026;

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan</b> |                                                                           |               |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                                              | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                                  | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                           |
| 1.                                                                                                                                     | Identifikasi permasalahan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan | Terlaksana    | Telah terlaksana melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan penyampaian sejumlah Nota Dinas kepada Deputi |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sulitnya mengumpulkan Pejabat yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan rapat secara fisik di Kantor
3. Masih belum sinkronnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait isu-isu di lapangan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan peserta yang hadir dalam rapat dapat mengambil keputusan atau mewakili pejabat yang diundang;
2. Melaksanakan rapat di hotel apabila memungkinkan atau Rapat virtual melalui Zoom;

3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus dengan para pemangku kepentingan.

### 3

#### **Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga**

##### **Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri dari 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

##### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga adalah skala 3 dari 4 (Baik) pada tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila seluruh layanan yang dihasilkan oleh Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga kepada oleh kementerian/lembaga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga **belum dapat diketahui realisasi kinerjanya** karena penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali dan baru dapat diketahui pada akhir triwulan II. Untuk realisasi Triwulan 1 dicantumkan nilai capaian pada Semester 2 Tahun 2025 yaitu sebesar **3,59 (3 dari 4)**. Jika dilihat dari pelaksanaan atas rencana aksi pada triwulan I 2026, dapat dikatakan seluruh kegiatan dalam rencana aksi perjanjian kinerja telah terealisasi seluruhnya atau sebesar 100% dari target triwulan I dengan ringkasan sebagai berikut:

| <b>Indikator Kinerja Utama</b>                                          | <b>Satuan</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Kinerja</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| IKU-3.1<br>Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan | Indeks        | 3 dari 4      | 3 dari 4*        | 100%<br>(Memuaskan) |



|                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pengendalian Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

\*Nilai Semester 2 Tahun 2025

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan 3 dari 4 (Baik). Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan pada Triwulan I 2026, dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga dapat tercapai.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga diproyeksikan dapat dilaksanakan dan memperoleh nilai yang diharapkan pada triwulan II 2026

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>3.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga</b> |                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                                                                                | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                                                                                                                                        | <b>Status</b> | <b>Keterangan</b><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)                                |
| 1.                                                                                                                                                                       | Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Semester I | Terlaksana    | Telah dilakukan serangkaian persiapan dalam mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang |



|  |  |  |                                                                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang akan dilaksanakan pada triwulan II 2026 |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tingginya dinamika isu ekonomi strategis menyebabkan permintaan layanan koordinasi meningkat, baik dalam bentuk rapat koordinasi, fasilitasi penyelesaian hambatan, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Dokumentasi dan hasil koordinasi belum sepenuhnya seragam, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap tindak lanjut yang telah disepakati.
3. Belum meratanya tingkat kepuasan layanan di seluruh *stakeholder*, masih adanya keterlambatan dalam tindak lanjut hasil koordinasi, serta terbatasnya umpan balik dari pengguna layanan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan agenda koordinasi, memanfaatkan teknologi rapat daring dan kolaborasi digital, serta melakukan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi.
2. Dilakukan survei kepuasan layanan secara berkala untuk memperoleh masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dilakukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi, penguatan kanal umpan balik melalui kuesioner digital dan forum diskusi, serta penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif.

## 4

### Sasaran Kegiatan 4. Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**4.1 Persentase Pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga**

**Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan dengan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga tahun 2026 terdiri dari: (i) 4 kegiatan pada Triwulan I; (ii) 3 kegiatan pada Triwulan II; (iii) 5 kegiatan pada Triwulan III; (iv) 3 kegiatan pada Triwulan IV

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun target triwulan sebesar 20%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 22% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama                                                                                                               | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|
| IKU-4.1<br>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Persen | 92     | 20        | 100 %<br>(Memuaskan) |

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan *cascading direct* dari Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Triwulan I 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi RB General yang telah ditetapkan.

Sampai dengan akhir triwulan I Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan I, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan I 2026.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

| <b>4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</b> |                                                                          |                      |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                                             | <b>Rencana Aksi TW I</b>                                                 | <b>Status</b>        | <b>Keterangan</b><br>(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb) |
| 1.                                                                                                                                    | Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU | Terlaksana           | Telah disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU                                    |
| 2                                                                                                                                     | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan                                    | Terlaksana           | Telah disusun Laporan Kinerja Triwulanan                                                                        |
| 3                                                                                                                                     | Penyusunan Renja 2026                                                    | Tertunda dan Digeser | Belum terlaksana menunggu MKKS                                                                                  |
| 4                                                                                                                                     | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI                                        | Terlaksana           | Telah terlaksana optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI                                                              |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya yaitu pelaksanaan beberapa rapat tertentu melalui daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pemahaman mengenai implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan RB General masih belum merata.
2. Terdapat keterbatasan data dukung awal karena belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I Taun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut :

1. Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada unit kerja mengenai implementasi Reformasi Birokrasi.
2. Partisipasi dalam tim kerja lintas unit untuk memperkuat koordinasi, menetapkan penanggung jawab pengelolaan data pada setiap unit kerja, serta melakukan standardisasi format dokumen pendukung.
3. Melakukan inventarisasi dan validasi data dukung sebagai dasar pelaksanaan.

Jakarta, 10 April 2026

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri,

Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga

Ismariny